
Kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan pelabuhan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang

Readiness of the community and the village government in the development of The Patimban Village Port, Pusakanagara District, Subang Regency

R L Safira¹, R R I Prasiwi¹, A Aulia¹, dan N R Putra²

¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia

²Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Subang, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author's email: aan.unisba@gmail.com

Abstrak. Pembangunan Pelabuhan Patimban yang tidak didukung oleh kesiapan masyarakat menimbulkan respon negatif, walaupun pembangunan tersebut ditujukan untuk mengembangkan Desa Patimban. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan Patimban dengan menggunakan *Community Readiness Model* (CRM) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu pengetahuan masyarakat, pengetahuan masyarakat terkait isu, sumber daya terkait isu, kepemimpinan, dan iklim masyarakat. Tingkat kesiapan masyarakat dilihat melalui perspektif tujuh informan kunci yang mewakili masyarakat dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesiapan masyarakat berada pada tahap inisiasi dengan dimensi terendah pada sumber daya terkait isu. Sementara itu, pada sisi pemerintah desa, tingkat kesiapan berada pada tahap *confirmation/expansion* dengan dimensi terendah pada pengetahuan masyarakat terkait isu dan iklim masyarakat. Strategi yang diajukan untuk meningkatkan tingkat kesiapan adalah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan pendampingan untuk mencegah marginalisasi masyarakat dengan mendorong peningkatan kualitas SDM.

Kata Kunci: CRM; Desa Patimban; Pembangunan Pelabuhan

Abstract. The construction of the Patimban Port which is not fully supported by the community has generated a somewhat negative response, even though the development is aimed at developing Patimban Village. This study aims to measure the readiness of the community and village government in the program of Patimban Port development by using the Community Readiness Model (CRM) which consists of five dimensions, namely community knowledge, community knowledge to the problem, resources to prevent, leadership, and community climate. The level of community readiness was measured from the perspective of seven key informants representing the community and village government. The results showed that the average level of community readiness was at the initiation stage with the lowest dimension in resource-related issues. Meanwhile, on the village government side, the level of readiness was at the confirmation/expansion stage with the two lowest dimensions being community knowledge related to issues and community climate. The strategy proposed to increase the level of community readiness is to be attentive to the aspirations of the community and to provide assistance preventing community marginalization through the improvement of the quality of human resources.

Keywords: CRM; Patimban Village; Port Construction

1. Pendahuluan

Sebagai penyangga Ibukota Negara, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terus dikembangkan melalui beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) [1]. Salah satu upaya pengembangannya yaitu membangun kawasan Segitiga Rebana yang mencakup wilayah Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan. Pengembangan Segitiga Rebana direncanakan menjadi kawasan industri baru dengan luas 54,000ha yang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri di Jawa Barat. Dengan konektivitas wilayah yang tinggi, Segitiga Rebana diharapkan mampu membuka peluang lapangan kerja baru dan menjadi salah satu daya tarik investasi terbaik di Asia Tenggara [2,3]. Investasi merupakan penggerak utama bagi pembangunan ekonomi. Investasi ini juga memiliki efek pengganda bagi kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran [4].

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana, merata, dan adil untuk kearah yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sehingga dapat meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat diantaranya aspek ekonomi, sosial dan budaya [5]. Baik pembangunan fisik maupun nonfisik, keduanya penting untuk pengembangan ekonomi wilayah. Sinergi pembangunan fisik dan non fisik merupakan tujuan utama dari pembangunan [6,7]. Salah satu kawasan pengembangan industri di kawasan Segitiga Rebana, yaitu Pelabuhan Patimban, merupakan strategi pemerintah dalam mengurangi kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok juga diharapkan dapat menjadi stimulator pengembangan wilayah di Kabupaten Subang. Pelabuhan adalah sarana penting untuk dijadikan tempat bertambat terutama untuk transportasi laut, adanya transportasi laut mempermudah perkembangan ekonomi suatu negara dan daerah dalam kegiatan ekspor dan impor [8]. Pada akhirnya pengembangan ini diharapkan mampu memacu peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat [9].

Pembangunan Pelabuhan Patimban direncanakan menggunakan lahan seluas 542 ha dengan rincian 300 ha lahan darat dan 242 ha reklamasi laut. Lahan darat yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Patimban utamanya merupakan lahan persawahan luas 117,5 ha. Fungsi lain yang terdampak adalah lahan perikanan tambak (92 ha), lahan perkebunan (12,5 ha), lahan perdagangan (12,5 ha), lahan peternakan (5 ha), dan lahan pengeringan ikan (2,5 ha) [10]. Pelabuhan Patimban akan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena menjadi pintu utama untuk kegiatan ekspor dan impor [11]. Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pada tahap pertama, Pelabuhan direncanakan dapat melayani 3,75 juta peti kemas. Pada tahap kedua, kapasitas pelayanan dapat meningkat menjadi 5,5 juta peti kemas, dan tahap ketiga akan kembali ditingkatkan hingga 7 juta peti kemas [12]. Melihat begitu besarnya potensi pembangunan Pelabuhan Patimban, perlu adanya upaya persiapan yang tidak hanya datang dari pihak pemerintah dan perusahaan pengelola pelabuhan saja. Upaya persiapan juga diharapkan datang dari masyarakat yang ada di sekitar kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban karena merupakan pihak terdampak pembangunan [13].

Pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif, bagi kehidupan manusia baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dampak positif dilihat dari percepatan ekonomi serta kebutuhan manusia tercukupi, sedangkan dampak negatif yaitu masyarakat direlokasi karena tanah dan bangunan dijadikan pembangunan, daerah pertanian sebagai mata pencaharian hilang, serta usaha kecil mikro menjamur [14]. Menurut J'afar dalam lek, infrastruktur berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek yang dapat menciptakan lapangan kerja terhadap sektor konstruksi, sedangkan dalam jangka panjang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas pada sektor-sektor terkait [14]. Prapti, Suryawaradana, dan Triyani pada tahun 2015 menyatakan bahwa pengaruh infrastruktur yang akan menentukan perubahan aspek ekonomi dan sosial masyarakat daerah satu dengan daerah yang lainnya dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru [15].

Hasil survei pendahuluan di lapangan memperlihatkan adanya pro dan kontra dalam pandangan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban sesuai dengan penelitian Iryana [5]. Pro dan kontra tersebut ditunjukkan dengan hanya sebagian masyarakat menilai adanya Pelabuhan Patimban membawa perubahan yang lebih baik. Nelayan yang semula berlayar menggunakan alat tradisional akan diganti dengan alat yang lebih modern. Untuk masyarakat pemilik lahan akan diuntungkan dengan mekanisme ganti rugi yang bahkan bisa lebih tinggi dari harga pasar sehingga masyarakat dapat membeli lahan pengganti yang lebih luas dibanding lahannya terdahulu. Sementara itu, masyarakat yang kontra menilai bahwa akan ada kesulitan untuk beralih profesi yang sangat berbeda. Ditambah dengan banyaknya pendatang yang mungkin memiliki keterampilan lebih baik sehingga peluang lapangan kerja baru menjadi terbatas.

Survei pendahuluan juga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mendukung melihat bahwa upaya peningkatan kualitas SDM melalui fasilitas pelatihan yang diberikan pemerintah daerah, serta adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Sementara itu, masyarakat sekitar yang menyatakan keberatan merasa terganggu dengan kebisingan. Selain itu, adanya ambil alih lahan garapan milik desa, belum adanya ganti rugi, serta perubahan rencana terkait pasar modern membuat keberatan semakin nyata. Masyarakat merasa belum siap dan belum memahami manfaat dan tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban.

Pembangunan Pelabuhan Patimban telah berjalan dalam tiga tahap, tetapi masih terlihat adanya perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap pembangunan antara masyarakat dan pemerintah desa. Pembangunan sebaiknya melibatkan partisipasi aktif semua masyarakat agar masyarakat peduli terhadap pembangunan yang ada dan dapat ikut serta dalam proses ekonomi yang bersifat produktif. Dengan bersifat produktif maka akan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan yang akan meningkatkan jumlah konsumsi dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan [16]. Karena pendekatan partisipatif sangat diperlukan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat maka secara langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat tetapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah yang mengakibatkan tingkat keberhasilan pembangunan kurang optimal [17].

Hasil survei pendahuluan dan penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum mendukung pembangunan pelabuhan terutama untuk nelayan dan petani penggarap karena sosialisasi yang diberikan hanya membahas kompensasi. Sementara itu, pemerintah desa mendukung dan memiliki pemahaman dasar karena terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban sudah disiapkan secara fisik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan masyarakat.

Kesiapan diartikan sebagai kondisi seseorang membuatnya siap untuk memberikan jawaban terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi serta dapat menjadi dasar tindak lanjut bagi masyarakat atau pemerintah. Masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu pembangunan. Dengan demikian, jika masyarakat belum siap program pembangunan akan terhambat [9,18]. Konsep tingkat kesiapan masyarakat terhadap suatu kegiatan dikembangkan oleh Tri-Ethnic Center for Prevention Research yaitu *Community Readiness Model* (CRM). CRM dapat membantu suatu kelompok atau komunitas untuk bergerak maju dan lebih berhasil dalam rencana perubahan dengan berbagai cara. Upaya yang dapat dilakukan antaranya adalah dengan mengukur tingkat kesiapan masyarakat pada beberapa dimensi yang akan membantu menganalisis permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan kemudian menjadi dasar untuk melakukan upaya awal dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan komunitas, serta hambatan untuk bergerak maju, dan membuat tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kesiapan [19]. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian kesiapan masyarakat karena dapat menjadi langkah dasar untuk menyusun tindakan yang mengatur langkah-langkah selanjutnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Patimban itu tidak lepas dari sejumlah pihak yang terlibat dalam skala lembaga maupun dalam tingkat individu. Salah satunya pihak yang berkaitan dengan pembangunan ini, yaitu pemerintah desa dan masyarakat sekitar [9]. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan melihat tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dan alternatif strategi dalam menghadapi pembangunan Pelabuhan Patimban.

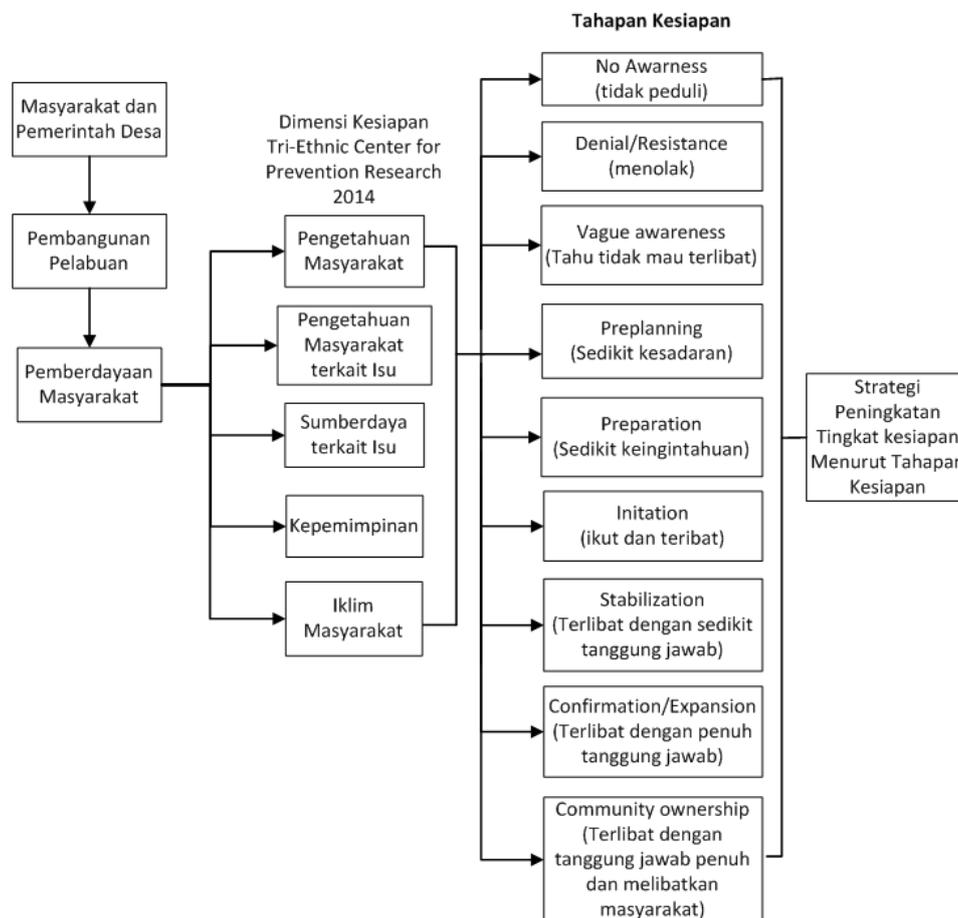
2. Metode

2.1. Data dan teknik analisis

Penentuan lokasi penelitian berada di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Lokasi ini dipilih karena Desa Patimban merupakan lokasi terdekat dari pembangunan pelabuhan dan terkena dampak langsung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis *Community Readiness Model* (CRM) dan analisis SWOT. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data diperoleh dari hasil literatur atau penelitian terdahulu, situs *website*, observasi, dan wawancara di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang pada bulan Desember 2021 selama 5 hari. Wawancara dengan informan kunci digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari keterlibatan langsung dalam pembangunan [20]. Dengan demikian, informan yang dipilih merupakan orang-orang yang mampu memberikan gambaran yang relatif akurat tentang sikap dan pengetahuan masyarakat, sehingga 6-12 informan saja sudah dinilai cukup [19].

Penelitian ini menggunakan tujuh informan kunci yang terdiri dari sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, petani penggarap, nelayan, pemilik usaha, dan pemilik lahan yang tergusur untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban. Sekretaris desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih menjadi informan kunci karena mengetahui masalah dan informasi terkait kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Sementara itu, petani penggarap, nelayan, pemilik usaha, dan pemilik lahan tergusur dipilih karena terkena dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Kerangka penelitian.

2.2. Variabel operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari lima hal seperti yang dinyatakan dalam kerangka penelitian dalam Gambar 1. Tabel 1 memuat penjelasan variabel, sub variabel, indikator dan rubrik penilaian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 menunjukkan variabel penelitian yang berdasarkan pada tujuan masing-masing rumusan masalah. Variabel ini merupakan dimensi atau tingkat kesiapan masyarakat. Terdapat lima dimensi faktor kesiapan masyarakat dalam *Community Readiness Model* (CRM) atau Model Kesiapan Masyarakat, yakni: (1) Pengetahuan masyarakat; (2) Pengetahuan masyarakat terkait isu; (3) Sumber daya terkait isu; (4) Kepemimpinan; dan (5) Iklim masyarakat [23]. Penentuan tingkat kesiapan masyarakat menggunakan skala pengukuran 1 - 5 yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, *range* yang digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat harus mengacu skala yang digunakan (lihat Tabel 2) [21]. Penetapan jarak (*range*) penilaian didapatkan dari hasil $\frac{\text{nilai maksimum}}{\text{banyaknya kriteria}} = 0,55$ sehingga klasifikasi penilaian tingkat kesiapan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel [21].

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Penilaian
1	Pengetahuan masyarakat	Tingkat kesadaran	Mendengar dan mengetahui tujuan dari pembangunan Pelabuhan Patimban.	1 - 5 Sangat tidak sadar - Sangat sadar
		Tingkat pengetahuan	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban.	1 - 5 Sangat kurang tersedia -sangat tersedia
2	Pengetahuan masyarakat terkait isu	Ketersediaan informasi	Ketersediaan informasi terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.	1 - 5 Sangat tidak tahu - sangat tahu
		Pengetahuan masyarakat terhadap masalah	Pengetahuan masyarakat mengenai kawasan Industri dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, dan dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.	1 - 5 Sangat sulit - Sangat mudah
		Kemudahan masyarakat mengakses informasi	Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan pelabuhan.	
3	Sumber daya terkait isu	Sikap masyarakat terhadap sumber daya	Dukungan masyarakat untuk mengikuti pertemuan membahas mengenai pembangunan pelabuhan.	1 -5 Sangat tidak mendukung - Sangat mendukung
4	Kepemimpinan	Peran pemimpin	Peran dan keterlibatan pemimpin terhadap pembangunan pelabuhan.	1 - 5 Sangat tidak berperan - sangat berperan
		Tingkat dukungan pemimpin	Dukungan pemimpin terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban.	1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung
5	Iklim masyarakat	Dukungan	Dukungan masyarakat dan Pemerintah desa.	1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung
		Hambatan	Hambatan yang dialami masyarakat dan pemerintah desa dalam menghadapi pembangunan pelabuhan.	1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung
		Sikap	Sikap masyarakat dan pemerintah desa terkait isu pembangunan pelabuhan.	1 - 5 Sangat tidak mendukung - sangat mendukung

Tabel 2. Penentuan tingkat kesiapan masyarakat.

No	Stage	Range
1	<i>No awareness</i>	0 - 0.55
2	<i>Denial/resistance</i>	0.56 - 1.10
3	<i>Vague awareness</i>	1.11 - 1.65
4	<i>Preplanning</i>	1.66 - 2.20
5	<i>Preparation</i>	2.21 - 2.75
6	<i>Initiation</i>	2.76 - 3.30
7	<i>Stabilization</i>	3.31 - 3.85
8	<i>Confirmation/ expansion</i>	3.86 - 4.40
9	<i>Community ownership</i>	4.41 - 5.00

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Pelabuhan Patimban telah dilakukan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada tujuh informan kunci yang kemudian diperoleh perbedaan kesiapan antara masyarakat dengan pemerintah desa sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Readiness stage* per dimensi di Desa Patimban.

Dimensi	Masyarakat		Pemerintah Desa	
	Skor	<i>Readiness Stage</i>	Skor	<i>Readiness Stage</i>
Pengetahuan masyarakat	3,3	<i>Initiation</i>	4,5	<i>Community ownership</i>
Pengetahuan masyarakat terkait isu	3,2	<i>Initiation</i>	4,2	<i>Confirmation / expansion</i>
Sumber daya terkait isu	2,8	<i>Initiation</i>	4,7	<i>Community ownership</i>
Kepemimpinan	3,5	<i>Stabilization</i>	4,4	<i>Confirmation / expansion</i>
Iklim masyarakat	3,4	<i>Stabilization</i>	4,2	<i>Confirmation / expansion</i>
Total	16,2		22	
Rata-Rata	3,24	<i>Initiation</i>	4,4	<i>Confirmation / expansion</i>

Pada Tabel 3 terlihat perbedaan yang nyata antara kesiapan masyarakat dengan kesiapan dari aparat pemerintah desa. Nilai skor memperlihatkan bahwa pada masyarakat secara keseluruhan berada pada *initiation stage* dengan skor 3,24. Skor terendah sebesar 2,8 pada dimensi sumber daya terkait isu dan skor tertinggi 3,5 pada dimensi kepemimpinan.

Sementara itu, untuk pemerintah desa secara keseluruhan berada pada *confirmation/expansion stage* dengan skor 4,4. Skor terendah sebesar 4,2 pada dimensi pengetahuan masyarakat terkait isu dan iklim masyarakat. Terakhir, skor tertinggi sebesar 4,7 pada dimensi sumber daya terkait isu.

3.1. Pembahasan dimensi kesiapan masyarakat

3.1.1. *Dimensi pengetahuan masyarakat.* Dimensi pengetahuan masyarakat berada pada *initiation stage*, yaitu sebesar 3,3 (lihat Tabel 4) yang artinya bahwa masyarakat sudah bersedia dan ikut terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Hal tersebut terlihat bahwa mereka bersedia lahannya digusur dengan kompensasi sejumlah nilai yang telah disepakati sebelumnya. Pengetahuan dalam aspek kesediaan untuk ikut terlibat dalam pembangunan dijawab oleh informan yang telah menerima sosialisasi tentang program ini sebelumnya. Berdasarkan temuan di lapangan, sosialisasi terkait pembangunan Kawasan Patimban ini lebih difokuskan pada masyarakat yang lahan dan usahanya tergusur.

Tabel 4. Dimensi pengetahuan masyarakat.

No	Responden	Rata - Rata Nilai	
		Pemerintah Desa	Masyarakat
1	Sekretaris Desa	5,0	
2	Badan Permusyawaratan Desa	4,7	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3,7	
4	Petani Penggarap		2,9
5	Nelayan		2,9
6	Pemilik Usaha		3,6
7	Pemilik Lahan Tergusur		4,0
Total Nilai		13,4	13,3
Total Rata-Rata Nilai		4,5	3,3

Sementara menurut informan dari kalangan petani penggarap dan nelayan, mengatakan tidak tahu apa manfaat dan tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban, mereka hanya sekedar tahu akan ada pembangunan tersebut tetapi tidak terlalu detail pengetahuannya. Menurut masyarakat, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat, kabupaten bahkan dari pihak perusahaan, hanya fokus pada permasalahan pengusuran lahan dan kompensasi. Sosialisasi hanya dilakukan terpusat sehingga tidak semua masyarakat menerima informasi dengan baik yang kemudian menyebabkan rendahnya keseragaman pemahaman yang ada di masyarakat. Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian Nuraeni pada tahun 2020 [22].

Berbeda pada tingkat pengetahuan informan, pemerintah desa berada pada *community ownership stage* dengan nilai 4,5 yang artinya pemerintah desa sudah ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa dilibatkan penuh sebagai pengambilan kebijakan karena pemerintah desa menjadi aktor sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki pemahaman yang sangat bagus mengenai tujuan dan manfaat Pelabuhan Patimban, antara lain untuk mengurangi beban lalu lintas pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok yang mengakomodasi 52 persen dari lalu lintas kontainer internasional di Indonesia.

3.1.2. *Dimensi pengetahuan terkait isu.* Dimensi pengetahuan masyarakat terkait isu berada pada *initiation stage*, yaitu sebesar 3,2 (lihat Tabel 5) yang artinya masyarakat secara keseluruhan sudah mulai memahami bahwa dengan pembangunan Pelabuhan Patimban akan dapat membuka peluang usaha baru yang diharapkan akan menambah pendapatan yang lebih baik. Menurut informasi dari hasil wawancara mendalam, diperoleh bahwa masyarakat sudah cukup tahu Pelabuhan Patimban ini akan dijadikan sebagai kawasan industri terpadu. Adanya pembangunan tersebut dapat menjadi peluang usaha baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 5. Dimensi pengetahuan terkait isu.

No	Responden	Rata - Rata Nilai	
		Pemerintah Desa	Masyarakat
1	Sekretaris Desa	4,7	
2	Badan Permusyawaratan Desa	4,3	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3,7	
4	Petani Penggarap		2,8
5	Nelayan		2,5
6	Pemilik Usaha		3,3
7	Pemilik Lahan Tergusur		4,2
Total Nilai		12,7	12,8
Total Rata-Rata Nilai		4,2	3,2

Sementara itu menurut nelayan, mereka tidak tahu bahwa proyek ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru karena pada umumnya nelayan merupakan mata pencaharian turun temurun serta apa yang mereka ketahui dan jalani selama ini adalah mencari ikan di laut. Oleh karena itu, dalam bayangan mereka akan tetap dapat berprofesi sebagai nelayan seperti biasanya dengan dibangunnya Kawasan Pelabuhan Patimban. Mereka tidak memahami

bahwa Kawasan Pelabuhan Patimban ke depan akan menjadi kawasan tertutup yang tidak sembarang orang bisa untuk mengakses laut di kawasan tersebut. Melihat dari tingkat pendidikan dan keahlian yang mereka miliki, tidak terbayang oleh mereka untuk alih profesi atau membuka jenis usaha baru.

Adapun menurut pemerintah desa skor yang didapat sebesar 4,2 berada pada *confirmation/expansion stage* yang artinya pemerintah desa sudah cukup memahami dan ikut bertanggung jawab bahkan ikut terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Menurut informasi dari hasil wawancara mendalam bahwa pemerintah desa sangat paham dengan adanya Pelabuhan Patimban akan menjadi kawasan industri sehingga pasti akan banyak manfaat yang diperoleh dan akan muncul peluang usaha baru. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa hal ini dibuktikan dengan munculnya usaha-usaha kecil menengah yang dilakukan oleh masyarakat seperti masyarakat membangun kontrakan dan warung-warung kecil.

3.1.3. Dimensi sumber daya terkait isu. Dimensi sumber daya terkait isu menurut masyarakat berada pada *initiation stage* yaitu sebesar 2,8 (lihat Tabel 6) yang berarti masyarakat sudah bersedia mengikuti musyawarah yang dilakukan pemerintah baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa petani penggarap dan nelayan tidak mendukung untuk terlibat aktif dalam mengikuti setiap pertemuan dan kegiatan musrenbang terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.

Masyarakat yang paling antusias mengikuti musyawarah adalah masyarakat yang memiliki lahan usaha dan lahan tergusur, sementara bagi petani penggarap dan nelayan menjadi tidak begitu tertarik karena bagi mereka yang paling penting bukan sebatas wacana tetapi harus segera dirasakan dan dijalankan. Masyarakat yang terdampak mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, masyarakat tidak didampingi sampai mereka mempunyai usaha baru atau dapat memanfaatkan keterampilan dan kemampuan baru sehingga ilmu yang diperoleh dari hasil pelatihan belum dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Sementara itu, menurut pemerintah desa sebesar 4,5 berada pada *community ownership stage* yang berarti ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa mendukung penuh terkait pembangunan Pelabuhan Patimban karena pemerintah desa ikut dilibatkan dalam berbagai pertemuan dan pembahasan tentang program pemulihan mata pencaharian bagi sumber daya masyarakat, khususnya nelayan yang terkena dampak dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan. Adapun beberapa pelatihan yang diselenggarakan yaitu pelatihan jasa usaha makanan (kuliner), pelatihan *basic safety training*, pelatihan perakitan, dan pemasangan jaring rampus kecil.

Tabel 6. Dimensi sumber daya terkait isu.

No	Responden	Rata - Rata Nilai	
		Pemerintah Desa	Masyarakat
1	Sekretaris Desa	5	
2	Badan Permusyawaratan Desa	5	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4	
4	Petani Penggarap		2
5	Nelayan		2
6	Pemilik Usaha		3
7	Pemilik Lahan Tergusur		4
Total Nilai		14	11
Total Rata-Rata Nilai		4,7	2,8

3.1.4. *Dimensi kepemimpinan.* Dimensi kepemimpinan pada masyarakat berada di *stabilization stage* sebesar 3,5 (lihat Tabel 7) yang artinya menurut masyarakat bahwa kepala desa dan pemerintah desa sudah terlibat, berperan penting dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada masyarakat diperoleh bahwa kepala Desa, LPM, dan BPD sudah berperan penting dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Mereka selalu mengikuti kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pengelola proyek untuk membahas terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Kepala desa pun terus berupaya mempertahankan apa yang menjadi hak masyarakat dan untuk kesejahteraan Desa Patimban dengan cara mendengarkan dan menyampaikan setiap aspirasi masyarakat terkait dampak yang mereka rasakan. Informasi serupa didapatkan dari *Detik News* bahwa pihak pemerintah desa sudah menyampaikan segala keluhan para nelayan kepada pemerintah pusat melalui kementerian kelautan dan perikanan terkait inovasi kapal dan alat tangkap untuk nelayan sehingga para nelayan seharusnya diperhatikan betul-betul [23].

Sementara itu, menurut pemerintah desa berada pada *confirmation/expansion stage* dengan skor 4,4 yang berarti pemerintah desa sudah cukup baik dalam memainkan peran kunci dalam membantu memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan pemikiran masyarakat dan keinginan untuk mulai ikut serta secara aktif dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan membantu menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat/pengelola proyek sehingga dapat dibuat strategi yang tepat untuk menangani permasalahan yang ada pada masyarakat.

Tabel 7. Dimensi kepemimpinan.

No	Responden	Rata - Rata Nilai	
		Pemerintah Desa	Masyarakat
1	Sekretaris Desa	4,6	
2	Badan Permusyawaratan Desa	4,8	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3,8	
4	Petani Penggarap		3,2
5	Nelayan		3,6
6	Pemilik Usaha		3,6
7	Pemilik Lahan Tergusur		3,6
Total Nilai		13,2	14
Total Rata-Rata Nilai		4,4	3,5

3.1.3 Dimensi iklim masyarakat. Dimensi iklim masyarakat berada pada *stabilization stage* dengan skor 3,4 (lihat Tabel 8) yang artinya masyarakat sudah mulai mendukung untuk sama-sama mewujudkan tujuan dibangunnya Pelabuhan Patimban. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa untuk petani, pemilik usaha, dan pemilik lahan bahwa mereka sudah mendukung adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dengan berpartisipasi dalam hal mengikuti pertemuan, musyawarah, atau rapat yang membahas terkait proyek tersebut.

Tabel 8. Dimensi iklim masyarakat.

No	Responden	Rata - Rata Nilai	
		Pemerintah Desa	Masyarakat
1	Sekretaris Desa	4,8	
2	Badan Permusyawaratan Desa	4,8	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3,0	
4	Petani Penggarap		3,3
5	Nelayan		2,7
6	Pemilik Usaha		3,5
7	Pemilik Lahan Tergusur		4,2
Total Nilai		12,7	13,7
Total Rata-Rata Nilai		4,2	3,4

Namun, nelayan tidak mendukung dan mengikuti berbagai kegiatan karena kegiatan yang dilakukan hanya untuk mereka yang ikut dalam kelompok dan terkena dampak langsung. Nelayan saat ini merasa kebingungan dengan pendapatan yang terus menurun drastis pasca pembangunan Pelabuhan Patimban, baik sejak tahap 1 maupun saat ini pada saat tahap 3. Penurunan pendapatan nelayan disebabkan karena mereka hanya bisa berlayar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Di samping karena dalam adanya proses pembangunan reklamasi, mereka kesulitan untuk menangkap ikan ke laut lepas yang lebih jauh karena kapal yang dimiliki hanya 5 GT dan alat tangkap masih menggunakan jaring kecil. Laut lepas bukanlah lahan yang dimiliki oleh para nelayan sehingga bagi nelayan tidak ada kompensasi alih kepemilikan lahan. Para nelayan berharap bahwa mereka pun akan mendapatkan kompensasi. Walaupun nelayan tidak memohon besaran ganti rugi secara pasti, pemerintah perlu mengkalkulasikan dampak, termasuk isu penyerapan tenaga kerja yang memang masih dikeluhkan masyarakat.

Adanya reklamasi pantai dalam pembangunan Pelabuhan Patimban, tidak hanya menyebabkan pendapatan nelayan yang terganggu. Hal ini mungkin akan menghilangkan mata pencaharian mereka akibat aktivitas lalu lintas kapal yang berlabuh kelak. Berdasarkan perhitungan *cost benefit analysis*, penurunan penghasilan nelayan pasca pembangunan pelabuhan (reklamasi) diperkirakan sebesar Rp. 337,500,000 per tahun [24]. Menurut informasi terbaru dari Kompas justru semenjak pelabuhan dibangun, hasil tangkapan ikan para nelayan turun drastis yang sebelumnya mendapatkan Rp 7,000,000 per hari, sekarang hanya mendapatkan sekitar Rp. 980,000 per hari atau 0.14 persen saja [25].

Pada pemerintah desa, skor sebesar 4.2 berada pada *confirmation/expansion stage* yang berarti ikut terlibat dan cukup bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa mendukung penuh terkait pembangunan Pelabuhan Patimban karena pemerintah desa ikut dilibatkan dalam musyawarah pengambilan keputusan mengenai Pelabuhan Patimban. Menurut pemerintah desa, masyarakat sudah ikut berpartisipasi dan ikut terlibat serta mendukung terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Terkait permasalahan yang dirasakan, pemerintah desa sudah menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemerintah daerah terkait harapan masyarakat serta bagi nelayan yang sangat merasakan dampak dari proyek tersebut dikarenakan pemerintah desa sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah, pengelola proyek, dan masyarakat sehingga jika ada informasi terbaru dapat langsung disampaikan kepada masyarakat. Hal ini pun sejalan dengan hasil wawancara BP4D Kabupaten Subang bahwa pemerintah desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat sekitar untuk menginformasikan hasil pertemuan-pertemuan dengan pemerintah daerah maupun pengelola proyek, karena pemerintah daerah sebagai pelaksanaan saja seperti mempersiapkan lembaga pelatihan ketenagakerjaan, pembinaan UMKM yang terdampak, serta menerima usulan-usulan untuk diajukan kepada pemerintah pusat. Terkait kelompok tani dan nelayan yang diikutsertakan dalam pembinaan pemerintah desa karena kelompok ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat.

3.2. Angka ideal tingkat kesiapan masyarakat

Tingkat kesiapan masyarakat menggunakan angka ideal dengan tingkat skor 5 [19]. Pada Gambar 2 terlihat bahwa tingkat kesiapan masyarakat lebih jauh dari nilai ideal dibandingkan dengan kesiapan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan urgensi penanganan kesiapan pada elemen masyarakat lebih besar ketimbang pada elemen pemerintah desa.



Gambar 2. Upaya pencapaian tingkat kesiapan.

Tingkat kesiapan masyarakat berada pada *initiation stage* yang menunjukkan bahwa telah tersedia cukup informasi untuk menjustifikasi usaha. Tingkat kesiapan ini ditandai dengan:

- Sebagian besar masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pembangunan Pelabuhan Patimban.
- Sebagian masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa, daerah dan pusat.
- Masyarakat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- Kepemimpinan memiliki peranan kunci dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi program pemerintah pusat.

Menurut informasi dari BP4D Kabupaten Subang, pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, memfasilitasi pelatihan-pelatihan untuk mendorong munculnya berbagai peluang usaha baru bagi masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban. Beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan, antara lain pelatihan kewirausahaan, pelatihan pembuatan produk makanan, pelatihan peningkatan kualitas, dan produksi makanan, pelatihan las industri, dan mekanik mesin. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pada saat pembangunan Pelabuhan Patimban dan juga memberikan pelatihan untuk usaha alternatif bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Namun, pelatihan tersebut hanya membuka peluang untuk pekerjaan operator dan tenaga kerja kasar sehingga masih perlu upaya lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada level yang lebih tinggi.

Data menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang diserap dari luar daerah karena kurangnya kualitas SDM lokal. Informasi ini didapatkan dari *Liputan 6* mengenai penyerapan tenaga kerja bahwa pemerintah membuka peluang lapangan pekerjaan baru sekitar 149 ribu dan angka itu terus bertambah dengan target 4,5 juta pekerja dalam 10 tahun kedepan [26]. Berdasarkan informasi pada *Kontan.co.id* bahwa masyarakat sekitar hanya mampu diserap 308 dari total 804 pekerja di proyek Pelabuhan Patimban dan hanya sebagai kuli bangunan saja [27].

Pada elemen pemerintah desa, skor kesiapan menunjukkan sudah berada pada *confirmation/expansion stage*. Hal ini ditandai dengan beberapa hal berikut, yaitu:

- Pemerintah desa sudah sangat memahami pengetahuan dasar mengenai manfaat dan tujuan dari pembangunan Pelabuhan Patimban.
- Pemerintah desa sudah berperan penting dalam pengambilan kebijakan.
- Pemerintah desa sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Pemerintah desa pun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman atau informasi yang didapatkan dari hasil pertemuan tersebut.
- Pemerintah desa sebagai jembatan pelaksana pemerintah daerah yang mengkondisikan dan mengakomodasi masyarakat untuk dilaksanakannya pelatihan-pelatihan.

Pemerintah desa mengharapkan masyarakat setelah mengikuti pelatihan dapat mandiri dan memunculkan rasa kreatif dan inovatif. Namun, harapan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik karena pendampingan yang belum maksimal. Keterbatasan SDM yang dimiliki desa serta kurangnya kerjasama dengan pihak lain merupakan alasan ketidakefektifan pelatihan ini. Untuk fasilitasi, pemerintah desa sudah mengarahkan masyarakat untuk menggunakan dana yang sudah dialokasikan dari BUMDes melalui pembentukan 75 kelompok yang kemudian didaftarkan ke Dinas Perikanan untuk diberi bibit dan modal.

Terkait kompensasi, informasi dari *website* resmi Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan bahwa nelayan yang terkena dampak pembangunan Pelabuhan Patimban akan mendapatkan kompensasi. Namun, terjadi kendala pada aturan dan ketentuan yang tidak mengatur secara jelas tolak ukur pemberian kompensasi [28]. Pemerintah saat ini terfokus untuk meningkatkan kualitas SDM melalui rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia yang masih berada di bawah rerata Provinsi Jawa Barat. Upaya pemerintah daerah untuk menunjang keterampilan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan membuat lembaga vokasi/pendidikan vokasi, membuka ujian kesetaraan paket C, dan akan membuka akademi maritim. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM lokal.

3.3. Strategi penanganan tingkat kesiapan

Dalam penelitian ini, pemilihan strategi berdasarkan skor yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating yang diperoleh dari 7 informan kunci. Analisis SWOT ini dibagi menjadi dua yaitu, analisis IFAS dan analisis EFAS. Analisis IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summary*) merujuk pada hal yang berasal dari internal, dalam penelitian ini adalah

masyarakat. Sementara analisis EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*) merujuk pada hal yang berasal dari eksternal, dalam penelitian ini merupakan pemerintah.

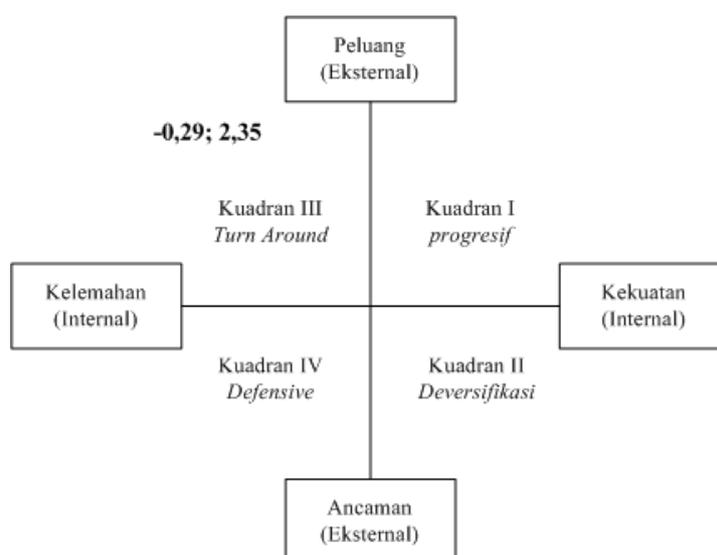
Analisis IFAS memiliki skor total analisis faktor internal sebesar -0.29. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan masyarakat memiliki kemampuan yang rendah dalam merespon berbagai perubahan. Dalam hal ini, kekuatan (*strength*) paling tinggi terdapat pada tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembangunan Pelabuhan Patimban dengan skor 0.83. Sementara itu, untuk kelemahan (*weakness*) terdapat pada pendapatan berkurang setelah adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dan sebagian besar masyarakat dirugikan dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban dengan skor 0.21.

Analisis EFAS memiliki skor total analisis faktor eksternal sebesar 2.35. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya. Dalam hal ini, peluang (*opportunity*) paling tinggi terdapat pada pemerintah pusat memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM dan pemerintah memberikan uang kompensasi penggusuran lahan sesuai harga pasar dengan skor 0.83. Sementara itu, untuk ancaman (*threats*), yakni pemerintah belum memberi kompensasi terkait tanah desa dengan skor 0.28.

Penentuan strategi yang tepat dalam meningkatkan tingkat kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dengan adanya pembangunan Patimban maka perlu diketahui dahulu posisi IFAS dan EFAS tersebut dalam kuadran analisis SWOT. Rumus yang digunakan untuk menentukan posisi strategi yang tepat adalah sebagai berikut:

IFAS = Nilai Kekuatan - Nilai Kelemahan

EFAS = Nilai Peluang - Nilai Ancaman



Gambar 3. Diagram analisis SWOT strategi peningkatan tingkat kesiapan.

Gambar 3. menunjukkan bahwa strategi dalam peningkatan tingkat kesiapan yang paling optimal berada pada kuadran III yaitu strategi yang berorientasi pada perubahan atau strategi WO (*Weakness - Opportunity*). Hal ini berarti pemerintah menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal untuk dapat merebut peluang yang lebih baik. Strategi *turn around* artinya pemerintah disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja. Dengan demikian, strategi WO yang diusulkan adalah:

- a. Menerima aspirasi masyarakat dan melakukan pendampingan yang lebih intens kepada masyarakat terkait kebutuhan jenis pelatihan, jenis peluang usaha yang sesuai dengan kapasitas masyarakat saat ini.
- b. Mencegah marginalisasi masyarakat sekitar Pelabuhan Patimban melalui pengembangan kegiatan penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan sekitar Pelabuhan Patimban.
- c. Mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan peluang kerja di masa yang akan datang dan mampu bersaing dengan tenaga kerja pendatang yang akan mendukung kawasan sekitar Patimban.
- d. Mengembangkan kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif efektivitas peran tenaga pendamping desa atau melalui kerjasama dengan akademisi agar dapat mengangkat ekonomi lokal.
- e. Mendorong tingkat kemandirian masyarakat dalam kreativitas, inovasi, dan inisiatif untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan level pendidikan dan keterampilan masyarakat agar masyarakat tidak hanya sebagai tenaga kerja kasar di kawasan Pelabuhan Patimban sehingga dapat memanfaatkan peluang kerja yang dibutuhkan di kawasan Pelabuhan Patimban di masa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Tingkat kesiapan masyarakat di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang dalam pembangunan Pelabuhan Patimban baru sampai tahap *initiation stage* atau pada level ke-6 dari 9 level yang ada, sedangkan kesiapan pemerintah desa telah mencapai pada *confirmation stage* atau level ke-8 dari 9 level yang ada. Masyarakat telah cukup memperoleh informasi terkait pembangunan Pelabuhan Patimban dan memahami bahwa pembangunan memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi masyarakat. Hanya saja manfaat dan pengaruh positif tersebut belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di samping itu, informasi tingkat kesiapan pemerintah desa menunjukkan bahwa secara umum data dan informasi mengenai Pelabuhan Patimban telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah desa.

Posisi tingkat kesiapan tersebut dapat membantu pemerintah desa setempat dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan terkait upaya untuk membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai permasalahan, penyebab, dampak, dan solusi dalam pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Patimban. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di Desa Patimban, baik dari segi pendidikan,

kompetensi, serta pengetahuan agar dapat memanfaatkan peluang, seperti menciptakan peluang usaha yang relevan, dapat terserap sebagai tenaga kerja di Kawasan Pelabuhan Patimban, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah untuk membangun kesadaran publik kesempatan, potensi, permasalahan, serta tantangan yang ada, dengan melakukan pendampingan masyarakat dan aparat desa bersama akademisi maupun lembaga lain yang terkait. Saran penelitian lanjutan adalah dengan menambahkan lokasi penelitian di kawasan yang lebih luas karena ini merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN), serta dapat menambahkan variabel indikator yang lebih banyak sehingga dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap masyarakat lebih terlihat jelas. Dengan demikian, strategi yang dibangun dapat lebih tepat untuk mengatasi permasalahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan pedesaan.

Referensi

- [1] Praditya II. Infrastruktur Jadi Penggerak Baru Ekonomi Jawa Barat. *Liputan 6* 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3593061/infrastruktur-jadi-penggerak-baru-ekonomi-jawa-barat> (accessed July 23, 2022).
- [2] BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. FGD, Kepala Bappeda Kenalkan Rebana. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 2020. <http://bappeda.jabarprov.go.id/fgd-fraksi-pdip-kepala-bappeda-kenalkan-rebana/> (accessed July 23, 2022).
- [3] Pamungkas WW. Jelajah Segitiga Rebana III: Ada Ruang, Ada Peluang. *BisnisCom* 2020. <https://bandung.bisnis.com/read/20201103/550/1312779/jelajah-segitiga-rebana-iii-ada-ruang-ada-peluang> (accessed July 23, 2022).
- [4] Syaihu A. Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur. *J Ekon Pembang* 2012;10. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3713>.
- [5] Iryana AB. Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusanegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Caraka Prabu J Ilmu Pemerintah* 2018;2:21–40. <https://doi.org/10.36859/jcp.v2i1.398>.
- [6] Tim Persiapan Badan Pengelola Kawasan REBANA. Focus Group Discussion #3 An Introductory to the Concept and Outlook of REBANA Industrial Development 2021.
- [7] Antonius. Ini Keuntungan dari Keberadaan Pelabuhan Patimban. *Truckmagz* 2020. <https://truckmagz.com/ini-keuntungan-dari-keberadaan-pelabuhan-patimban/> (accessed July 23, 2022).
- [8] Mayasari S. Mulai Januari 2021, Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I Tahap II Dikebut. *Newssetup* 2020. <https://newssetup.kontan.co.id/news/mulai-januari-2021-pembangunan-pelabuhan-patimban-fase-i-tahap-ii-dikebut?page=all> (accessed July 23, 2022).
- [9] Kurniati E, Meidiana C, Wicaksono A. Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus Di Kelurahan Oi Fo’o, Kota Bima-NTB). *Indones Green Technol J* 2015;4:18–27.

- [10] Amalia M, Malihah E. Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado. *Sosietas* 2016;6. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4248>.
- [11] Gultom RZ, Tini AQ. Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *J Ilm Ekon Islam* 2020;6:203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>.
- [12] Londa VY. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *J Adm Publik* 2020;6:1–8.
- [13] Ompusunggu VM. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *J Chem Inf Model* 2019;53:1689–99.
- [14] Iek M. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). *J Ekon Kuantitatif Terap* 2013;6:30–40.
- [15] Prapti L, Suryawardana E, Triyani D. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Di Kota Semarang. *J Din Sosbud* 2015;17:82–103. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>.
- [16] Sugianto, Permadhy YT. Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *IKRA-ITH Ekon* 2020;2:54–63.
- [17] Ivanna J. Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan Partisipatif. *J Gener Kampus* 2018;11:35–45.
- [18] Ramadhan FL. Arahan Peningkatan Kesiapan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Banyuwangi 2015:272.
- [19] Conahan JA, Kyere E. Community Readiness: Can the Human Services Delivery System Meet the Needs of Human Trafficking Victims. *Int J Interdiscip Soc Community Stud* 2015;10. <https://doi.org/10.18848/2324-7576/CGP/v10i03/53523>.
- [20] Hasibuan SN, Sebayang AF, Sundaya Y. Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus : Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat) The Residents Village Readiness on Village Fund Management Pendahuluan pembangunan ke arah yang lebih baik . Berbagai inovasi d. Kesiapan Masy Perdesaan Dalam Mengelola Dana Desa 2020;6:10–8.
- [21] Utami F, wawargita Wijayanti, dian Dinanti. Penilaian Stakeholder Terhadap Kesiapan Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul. *Tata Kota Dan Drh* 2019;11:61–70. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2019.011.02.2>.
- [22] Nuraeni, Darmawan A, Nugraha DA. Studi Efektivitas Sosialisasi Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Dan Penerimaannya Oleh Masyarakat. *J Komun Univ Garut Has Pemikir Dan Penelit* 2020;6:390–8.
- [23] Firmansyah D. Nelayan Demo Tuntut Ganti Rugi Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban. *DetikNews* 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5096544/nelayan-demo-tuntut-ganti-rugi-dampak-pembangunan-pelabuhan-patimban> (accessed July 23, 2022).

- [24] Somadi S. Cost-Benefit Analysis Pembangunan Pelabuhan Patimban Terhadap Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Subang. *Competitive* 2020;14:9–20. <https://doi.org/10.36618/competitive.v14i2.607>.
- [25] Farhan F. Menjerit Hasil Tangkap Anjlok, Ratusan Nelayan Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban. *KompasCom* 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/095813678/menjerit-hasil-tangkap-anjlok-ratusan-nelayan-terdampak-pembangunan> (accessed July 23, 2022).
- [26] Kencana MRB. Pelabuhan Patimban Bakal Serap 4,5 Juta Tenaga Kerja. *Liputan 6* 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4425181/pelabuhan-patimban-bakal-serap-45-juta-tenaga-kerja> (accessed July 23, 2022).
- [27] Anjaeni R. Pemprov Jawa Barat Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Strategis Nasional. *KontanCold* 2020. <https://regional.kontan.co.id/news/pemprov-jawa-barat-dorong-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-proyek-strategis-nasional> (accessed July 23, 2022).
- [28] Prokompim Diskominfo Kabupaten Subang. Merespon Jerit Nelayan Terkait Dampak Pembangunan Patimban Bupati Subang Dan Bupati Indramayu Bertemu Hadirkan Pihak Terkait. *SubangGold* 2022. <https://subang.go.id/public/berita/merespon-jerit-nelayan-terkait-dampak-pembangunan-patimban-bupati-subang-dan-bupati-indramayu-bertemu-hadirkan-pihak-terkait> (accessed July 23, 2022).